

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menjelaskan tentang Analisis Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019 dapat disimpulkan:

1. Dengan melihat pada instrument-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja, yaitu : target kinerja dan tolok ukur kinerja. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya menerapkan instrument-instrumen yang ada dalam Anggaran Berbasis Kinerja.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu:
 - 1) Sumber Daya Manusia
 - 2) Komitmen Organisasi
 - 3) Informasi

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelolah anggaran berbasis kinerja dengan instrument – intrumen yang telah diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan efektif dan efisien. Maka diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dalam proses pengelolaan keuangan lebih meningkatkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
- b. Disarankan agar dalam proses pengelolaan keuangannya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan Analisis Standar Belanja sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerahnya, agar dapat memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerahnya dapat terkontrol dengan baik. Dan dengan penerapan Analisis Standar belanja ini diharapkan agar pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat lebih ekonomis, efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra.2006.*Akuntansi Sektor Publik*.Jakarta:Erlangga.
- Bastian,Indra.2010. *Akuntansi Sektor Publik*.Jakarta:Erlangga.
- Basuki, Sulistyo. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta : Penaku.
- Cipta, Hendra. 2011. *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 1*, Jurnal Manajemen Kinerja. Tanah Datar.
- Didi Apriadi .2006. *Skala Likert Kriteria Penilaian*. Jurnal Ekonomi Pembangunan , Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Halu Oleo. Sulawesi Tenggara.
- Erlina; dkk. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul.2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul.2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Halim,Abdul& Kusufi,Muhammad Syam.2013.*Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:Salemba Empat.
- Mursitawati, Karunia.2014. *Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Layanan Umum (BLU)*. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang
- Mardiasmo.2009.*Akuntansi Sektor Publik*.Jakarta:Selemba Empat.
- Zikri, Nahyan.2014. *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Kecamatan Pontianak Barat*. Jurnal kajian ilmiah Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)
- Robertson & Mahsun.2007. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Subramayam, K.R& Wild, Jhon J.2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta :Selemba Empat.
- Zikri, Nahyan.2014. *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Kecamatan Pontianak Barat*. Jurnal kajian ilmiah Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)

- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- _____, Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Keuangan Daerah*.
- _____, Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Keuangan Daerah*.
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah*.